POLITIK DALAM ISLAM

(Perspektif Sejarah dan Kontemporer)

Mohd. Iqbal Fikri (Uwang Basogha)

Bencana Ilmu itu adalah lupa, bair tak lupa menulislah

Tulisan ini saya buat pada tahun 2006 dan materi ini saya sampaikan langsung di hadapan Prof. Dr. Din Syamsudin selaku dosen saya waktu itu.

Abstrak

Keberadaan Islam dalam berbagai bidang tentu bukan hal yang diragukan, segala aspek dari sisi kehidupan mendapat porsi yang sama dalam ajaran Islam, termasuk persoalan politik. Hal yang berhubungan dengan kekuasaan ini sangat menarik perhatian para peneliti karena sejarah Islam sendiri sudah menorehkan catatan panjang perjalanan kekuasaan dalam konteks pemahaman politik umat Islam, kontroversi pendirian partai, politisi muslim dalam menerjemahkan kekuasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran singkat tentang politik dan Islam dalam tinjauan sejarah dan kontemporer.

A. Latar Belakang

Ketika mendefinisikan Islam terpisah dari politik terdapat berbagai ketimpangan yang melingkupinya, baik di wilayah *sosial-kultural* ataupun relasi antara agama dan negara, dan juga Islam juga tidak pernah mendefinisikan politik secara lengkap. Meski demikian, umat Islam pada umumnya mempercayai Islam sebagai sebuah agama yang universal, Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengedepankan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Salah satunya Sosiolog Emile Durkheim yang secara sinis ia mengatakan "*ide tentang agama adalah roh masyarakat*".[1]

Sebagaimana rumusan di atas, pada tingkat praktis politik Islam merupakan sesuatu yang cukup problematik. Gerakan politik yang mengatas namakan Islam selalu melahirkan ketegangan dalam berbagai hal, terutama dalam diskursus negara-bangsa *(nation-state)*. Beberapa kalangan berpendapat, Islam merupakan satu kesatuan yang mempunyai tipikal *sosio-politik* yang tidak terpisahkan, pendapat ini diperkuat dengan doktrin *"Inna al-Islaam Din wa Daulah"* (Sesungguhnya Islam itu adalah agama dan

---

[1] Durkheim memandang bahwa fakta sosial lebih fundamental dari pada fakta individual, masyarakat seringkali lebih memprioritaskan kepenentingan individu yang berimbas pada kebobrokan sosial. Lihat Emile Durkheim, "Kesakralan Masyarakat", dalam Daniel L. Pals, *Dekontruksi Kebenaran; Kritik Tujuh Teori Agama,* (Yogyakarta; IRCiSoD 2001), hlm. 137.

negara).[2] Sementara kalangan Islam yang lain lebih cenderung memaknai sifat universalitas Islam kearah yang lebih substansialistik.[3] Kecenderungan demikian lebih mengutamakan isi dari pada sekedar wadah politik yang dalam praktek politiknya bukan bertujuan untuk memapankan struktur politik yang ditandai dengan terbentuknya negara Islam secara formal, akan tetapi lebih cenderung kepada etika dan moralitas politik yang diilhami oleh substansi ajaran-ajaran Islam.

Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politk-nya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi muhammad SAW melakukan dakwah untuk yang pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslim dibelahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW, dalam menggagas politik yang berkarakter Islamis.[4] Dr. Abdelwahab El-Affendi mengatakan: *"Setelah Nabi wafat, ummat Islam mulai berhadapan langsung dengan persoalan otoritas negara..., otoritas politik yang dibangun Nabi merupakan asosiasi sukarela.."*[5]

Menurut Azyumardi Azra, ada dua pandangan besar tentang hubungan Islam dan politik. Kelompok *Pertama,* melihat politik sebagai

---

[2] Abd. Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk, *Negara Tuhan; The Thematic Encyclopaedia,* (Yogyakarta; SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 6.

[3] Istilah tersebut digunakan oleh Islah Gusmian dalam pengantarnya "Langgam Politik Islam Indonesia; dari Formalistik ke Subtansialistik", dalam Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi,* (Yogyakarta: Galang Press 2001), hlm. vii-xx.

[4] Pendapat para kalangan teoritikus sesekali melihat kehadiran Nabi SAW sebagai bentuk awal dari pelajaran politik dalam agama Islam. Jalaluddin Rahmat menegaskan hal tersebut didalam tulisannya yang menjadi pengantar dari buku Yamani. Lihat Yamani. *Antara Al-Farabi dan Khomeini*; *Filsafat Politik Islam,* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 9.

[5] Bahkan dia menyebut semua institusi beserta pola kerja yang dilakukan oleh lembaga negara merupakan warisan dari Nabi SAW. Hampir semua bersifat sukarela, lebih jelas lihat**,** Dr. Abdel Wahab El-Affendi**.** *Masyarakat Tak Bernegara; Kritik Teori Politik Islam,* terjemah, Amiruddin Ar-Rani, (Yogyakarta: LkiS, 1991) hlm. 23-24.

bagian integral dari agama. Dalam hal ini, Islam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan *siyasah* (politik). Muslim yang meyakini pandangan ini berpendapat, umat Islam harus terlibat dalam politik praksis, menegakkan sistem politik Islam, bahkan negara Islam. Kelompok *kedua* berpendapat bahwa politik memang bagian dari agama (Islam), tetapi antara keduanya ada perbedaan karakter yang sangat esensial. Islam bersifat Ilahiah, berasal dari wahyu, sakral dan suci. Sedangkan politik berkenaan dengan kehidupan profan, kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif.[6] Lebih lanjut, Azyumardi Azra mengingatkan kepada para ulama untuk sebaiknya tidak terlibat dalam wilayah politik, integritas keulamaan serta *muru'ah*-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga dirinya sebagai ulama.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penulis sadari bahwa dalam mendiskusikan politik Islam adalah pembahasan yang luas, oleh karenanya disini penulis membatasi pada makna ppolitik Islam oleh para pemikir Islam dan Implikasi nya. Oleh sebab itu untuk memperoleh suatu kejelasan, maka diajukan permasalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah para pemikir Islam mendefinisikan Politik Islam dan implikasinya bagi kehidupan umat muslim (realitas sosial)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna Politik Islam?
2. Untuk mengetahui bagaimana para pemikir Islam memaknai politik.

---

[6] Azyumardi Azra, *Islam Subtantif: Agar Umat Tidak Jadi Buih*, (Bandung: Mizan 2000), hlm. 144.

3. Untuk mengetahui implikasi pemikiran politik Islam oleh ahli terhadap keberlangsungan kehidupan sosial atau bernegara masyarakat muslim.

Sedangakan kegunaan penulisan ini adalah:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya.
2. Memenuhi tugas pada mata kuliah Pengantar Studi Islam.

D. Analisis

Politik merupakan kajian yang sudah berumur, barangkali usianya seusia dengan umat manusia itu sendiri, makanya tak heran ketika banyak pihak yang memberikan perhatian dan mendalami ilmu politik tersebut. Politik menurut bahasa adalah hal yang berhubungan dengan kekuasaan, definisi ini disampaikan oleh Harold Lass Well, atau secara sederhana diartikan *'Who gets what, when, and how"*.[7]

Politik dalam terminologi latin (Yunani) disebut *polis*, artinya kota.[8] Dalam perkembangan ilmu politik, maknanya menjadi luas. Dalam *Kamus Internasional*, politik adalah proses menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari sistem politik dengan melakukan seleksi antara beberapa pilihan dari tujuan yang ditetapkan.[9] Politik juga identik dengan kekuasaan (*power*), kewenangan (*outority*) dan kebijakan umum (*public policy*). Menurut Kartini

---

[7] Sulistiyawati, Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 13.

[8] Perkataan politik berasal dari bahas Yunani , yaitu "politikus" dari akar kata "polis" yakni negara kota, dan juga dari bahasa latin yaiyu politica yang telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Berarti hingga kini telah digunakan lebih dari 25 abad. Kota Athen adalah pusat pemerintahan orang-orang Yunani Kuno. Mereka menganggap bahwa dunia ini hanya wilayah mereka saja dan disebuykan sebagai polis. Setelah ia bergabung dengankota Sparta, Thesallia, Corynthe, Mylithos dan Samos, konsep polis semakin luas, ia meliputi kota-kota yang baru bergabung itu. Ahli filsafat Yunani yang pertama kali memperkenalkan istilah ini ialah Plato (427-347 SM) dengan karyanya Politica. Inilah buku yang pertama kali ditulis yang membicarakan tentang poltik dan merupakan peintis bagi kelahiran ilmu politik. Lihat Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam,* Jilid I, (Jakarta Bulan Bintang, 1977), hlm. 20. Dan lihat juga Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung : Alumni, 1981), h. 13.

[9] Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1993), h. 129.

Kartono, politik dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan peraturan, undang-undang, hukum, kebijakan, kekuasaan, organisasi, taktik, strategi, mengendalikan wilayah secara yuridis dan konstitusional.[10]

Politik, dalam terminologi Arab disebut "*as-siyasah*" *masdar* dari kata "*sasa yususu*". Pelakunya disebut "*sa'is*". Menurut Qardhawy[11], kosa kata ini berasal dari bahasa Arab asli. Seterusnya, Qardhawy menukil penggalan kata dari *Lisanul Arab*, karangan Ibnu Manzur, kosa kata "s*awas*a", -"a*s-sus*", artinya kepemimpinan. Dengan demikian, jika dikatakan "*sasuhum susan*", mereka mengangkat seorang menjadi pemimpin, sehingga formulasi dari kata-kata berikut mengandung arti: seseorang mengatur urusan politik. Jadi, secara lengkap "*as-siyasah*" artinya kewajiban menangani sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan. Politik atau *siyasah* dalam Islam bermakna mengurus, memimpin, memerintah, menyuruh, mengelola kepentingan umum, *al-hakimiyah*, *al-mulk*, menegakkan syari'at.[12]

Beberapa pengertian politik Islam secara komprehensif dan dipandang memenuhi persyaratan teks akademis politik secara umum seperti pendapat Ibnu Aqil, Ibn 'Abid al-Din yang dikutip oleh Djazuli[13], sebagai berikut: "Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan". *Siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari pada Nabi baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *siyasah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para sultan dan raja) bukan

---

[10] Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, (Bandung, Mandar Maju, 1996), h. 9.

[11] Syaikh Abdul Malik Al-Jaziri, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen, Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani*, (Yogyakarta: Media Hidayat, 1419 H), h. 12-13.

[12] Rifyal Ka'bah, M.A., *Politik dan Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2005), h. 8-11.

[13] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h., 25-27.

dari ulama; sedangkan secara batin *siyasah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.

Dari kedua pengertian di atas, menurut Ali Syariati, politik Islam selain menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), juga dalam waktu yang sama dapat menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya politik (*politique*) dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.[14] Dalam arti kata, cakupan politik Islam memiliki dimensi vertikal (ketuhanan) dan dimensi horizontal (kemanusiaan), baik dalam aspek yuridis legislasi maupun praksis pemerintahan. Pertanggungjawaban-pun berbeda dengan ideologi politik profan. Cakupan politik Islam memiliki dua sisi pertanggung jawaban, yakni berdimensi hukum Tuhan dan kemasyarakatan.

Politik dalam Islam, seringkali memunculkan dua kutub pandangan yang bersifat ekstrim. Kedua pandangan itu adalah, pertama; kelompok yang berpendirian bahwa politik merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Kedua; kelompok yang menolak politik bukan sebagai bagian dari ajaran Islam. Pandangan kelompok pertama, melahirkan gagasan Islam *Din Ad-Daulah*, sementara kelompok kedua melahirkan negara sekuler. Walau demikian, ada juga pandangan lain berusaha mengkompromikan kedua pandangan tersebut. Terhadap dua pandangan ini muncul pandangan yang moderat, yang mencari jalan tengah, yakni negara dapat saja mengadopsi nilai-nilai ajaran agama (*Islamic Society*) dan tidak mesti mendirikan negara agama.

Adanya konsep perbedaan dan keragaman, terutama dalam kajian ideologi Islam, memberikan legitimasi kuat terhadap aksesibilitas untuk berbeda pendapat. Dalam perspektif ini, perbedaan pandangan tergolong

---

[14] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h., 28.

cukup radikal yaitu antara penyatuan atau pemisahan agama dengan politik. Hal ini disebabkan oleh pemikiran politik Islam yang mengakar pada doktrin Qur’an dan Sunnah serta Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, selalu diasumsikan berbeda. Perbedaan ini, terletak pada pemahaman yang berbeda pula terhadap teks ayat-ayat Qur’an dari aspek substansi materi dan terutama konstitusi.

Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan ini adalah kajian politik Islam yang merupakan permasalahan yang selalu aktual dan terus diperdebatkan dikalangan dalam Islam. Permasalahan konsep politik Islam dalam hal konsep bernegara atau *Islamic State* ataupun *Islamic Society* yang berkembang di dunia Islam.

Makna Politik Islam

Pembahasan tetang politik, negara dan pemerintah dalam perspektif makna politik Islam menggunakan dua pendekatan; yakni pendekatan terhadap sumber ajaran Islam (asas) dan perspektif sejarah peradaban Islam. Oleh karena Islam sebagai suatu ideologi sekaligus doktrin agama dalam konteks berbangsa dan bernegara, telah menguasai dunia selama beberapa abad lamanya. Sebelum membahas lebih dalam kedua aspek di atas, akan diawali dengan penjelasan singkat tetang akar dan makna politik secara umum. Mengkaji politik Islam, akan didasarkan pada dua aspek penting; yaitu asas dan sejarahnya. Pertanyaannya adalah apakah politik itu bagian dari ajaran Islam. Jika ditelusuri makna politik dalam *term* Qur’an maupun hadits, secara spesifik dapat dikatakan bahwa makna politik yang telah dijelaskan di atas bukan hanya memiliki padanan dalam Qur’an dan Hadits sebagai hubungan simbiosis, tetapi menjadi bagian dari misi kekhalifaan Nabi Muhammad SAW.

Misi inilah yang telah dilaksanakan oleh Nabi pada paruh kedua periode kenabian di Madinah. Setelah periode Nabi SAW, ekspansi Islam

tidak lagi terbatas secara geopolitik tetapi merekontruksi tatanan politik bangsa Arab dan dunia. Rekonstruksi ini meliputi aspek ideologi politik untuk membangun kekuasaan atau emperium Islam. Peristiwa Fathul Makkah, merupakan rekonstruki jazirah Arab oleh Nabi dalam suatu kesatuan kekuasaan. Untuk itu patut dikatakan bahwa Madinah merupakan Ibu Kota Negara Islam pertama[15].

Menurut Prof. M. Yusuf Musa, embrio negara Madinah telah terbentuk sejak di Nabi di Makkah. Dengan kata lain misi Nabi yang bersifat rahmat bagi alam bukan saja mengemban tugas agama dalan arti ritual semata, sebagaimana persepsi Barat dan kaum sekuler. Selanjutnya Musa menyatakan:

Dengan demikian, masalahnya sama sekali tidak seperti yang dikatakan sebagian orang-orang yang ingkar bahwa Rasul SAW., semasa di Makkah hanyalah seorang da'i yang menyerukan risalah keagamaannya dan selama masa kehidupannya di Makkah tidak pernah memikirkan untuk membentuk sebuah negara bagi kaum muslimin yang beliau akan menjadi pimpinannya, tetapi yang ada adalah pemikirannya tentang kehidupan yang Islami, namun mengapa sesudah hijrah terjadi suatu perubahan, lalu beliau berusaha untuk meraih kepemimpinan dan berjuang membentuk sebuah negara yang bersifat keagamaan dan politik sekaligus.[16]

Pendapat di atas tentu saja merujuk pada misi dan ajaran yang disampaikan Nabi SAW. Espesito dalam bukunya *Islam Aktual*, menulis bahwa bagi Islam, tak ada aspek kehidupan yang berada di luar kenyataan agama. Apa yang dikatakan dan dilakukan Nabi, baik secara lisan maupun tertulis melalui tradisi (hadits), merupakan aplikasi ajaran agama. Hadits

---

[15] Muhammad Syahrur, *Tirani Islam:Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Oleh Saifuddin Zuhri, (Yogyakrta: LkiS, 2003), h., 93.

[16] M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara Dalam Islam*, terj. oleh M. Talib), (Surabaya: Al-Ikhlas, tt), h. 29. Lihat juga, Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2003), h. 23.

membahas semua aspek kahidupan Nabi Muhammad, masyarakat secara individu dan publik, sosial dan politik.[17]

Menurut Hamim Thohary, prinsip dasar terbentuknya negara di Madinah, mempunyai ciri dan watak tersendiri. Dia bukan negara kota (*city state*) seperti di Yunani dan Sparta di masa purba, karena bukan kedaulatan wilayah yang menjadi tujuan gerakan Nabi, tetapi negara yang memberi ruang pada kedaulatan aqidah dan fikrah (paradigma). Dengan begitu, maka Madinah sebagai negara Islam pertama dari negara Islam berikutnya. Dhiauddin Rais mengemukakan bahwa sistem yang dibangun oleh Nabi SAW. dan kaum Muslimin di Madinah, jika ditinjau dari segi praktis dan diukur dengan variabel politik di era modern, bahwa sistem itu adalah sistem politik *par excellen*.[18]

Kajian tentang politik Islam (pemikiran politik Islam) dalam perspektif sejarah yang dianggap cukup representatif ialah karya Antony Black "*The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*", diterjemahkan oleh Abdullah Ali dan Mariana Ariestiawati dengan judul, "*Pemikiran Politik Islam dari Masa Nabi Hingga Kini*". Dari perspektif sejarah, hijrah Nabi SAW. dari Makkah ke Madinah (dulunya bernama Yatsrib) merupakan tonggak diletakkanya dasar-dasar pemerintahan secara umum. Piagam Madinah[19] menjadi lembaran negara dan dokumen sejarah di mana Nabi Muhammad SAW. mengadakan perjanjian (*bai'at*) dengan penduduk Madinah yang beragam kabilah dan agama (masyarakat

---

[17] John L. Esposito, *Islam Aktual*, terj. oleh Norma Arbi'a, (Jakarta, Inisiasi Press: 2002, h. 11.

[18] M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, terj. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 4.

[19] Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Maknah*, terj. oleh Wahib Wahab, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 317-322.

pluralistik). Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi, merupakan manifesto politik pertama dalam sejarah Islam.[20]

Konsep konstitusi Madinah, yang diyakini sebagai konstitusi pertama di dunia yang memuat dasar-dasar pemerintahan dalam berbangsa dan bernegara yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Piagam Madinah mencakup 47 pasal.[21]

Dari kedua pendekatan di atas, ada dua otoritas yang dimiliki oleh sosok Nabi Muhammad SAW. Pertama, sebagai utusan Allah (Nabi dan Rasul) untuk menyampaikan *risalah* (*syari'at*). Kedua, sebagai pemegang otoritas kekuasaan dalam pemerintahan. Dengan kedua fungsi ini, menunjukkan identitas Syari'at Islam sebagai sebuah misi keilahian untuk diberlakukan pada manusia.

Setelah Nabi Saw wafat, peran kepala negara digantikan secara berkala oleh empat sahabat Nabi. Di masa pemerintahan Umar-lah, terjadi penaklukan secara luas hingga mencapai Timur Tengah dan semenanjung Afrika. Ira M. Lapidus mencatat bahwa gelombang pertama penaklukkan dilanjutkan beberapa dekade berikutnya melalui gerakan baru dalam skala dunia. Wilayah Barat, Afrika Utara ditaklukkan antara 634-711, Spanyol ditaklukkan antara 711-759.[22]

Dengan demikian, umat Islam telah menegakkan kedaulatan wilayah secara geografis untuk penyebaran sebuah kultur bersama dan sebuah identitas sosial politik atas nama Islam. Dari Madinah, berdirilah daulah-

---

[20] W. Montgomeri Watt, *Muhammad Prophet and Statesman*, (London: Oxford University Press, 1961), h. 225. Lihat juga Abdul Karin Zaidan, *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*, (Jakarta: Bina Ilmu), h. 71-75.

[21] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2006), h.. 16. Lihat juga Rifyal Ka'bah, *op. cit.* h.. 3; Saripudin (ed), *Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dileme Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h.. 163.

[22] Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam,* Bagian kesatu dan Dua, terj. oleh Ghufron A. Mas'adi, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h. 61.

daulah Islamiyah seperti Khilafah Bani Umayyah di Damaskus pada tahun 41 H atau 661 M, yang melegalkan kekuasaannya sampai dengan tahun 127 H atau 745 Mi. Khilafah Abbasiyah di Bagdad pada tahun 132 H atau 750 M, yang berkuasa sampai dengan tahun 640 H atau 1242 M. Khilafah Bani Umayyah di Kordova (Spanyol) pada tahun 138 H atau 756 M, yang berkuasa sampai dengan tahun 418 H atau 1027 Mi. Khilafah Fatimiyah di Mesir pada tahun 296 H, atau 908 M, sampai dengan tahun 555 H atau 1160 M. Khilafah Utsmaniyyah di Istambul pada tahun 1290 sampai 1922 M.[23]

Wilayah politik berbasis agama, di manapun tidak lepas dari otoritas ideologi dan atau sistem nilai dari ajaran agama itu sendiri.[24] Dibalik itu, secara sosiologis, otoritas ideologi berwawasan agama terkadang mengalami tekanan politik dan sosio-ekonomi, yang cenderung bersifat pragmatis pada tiap kurun waktu tertentu. Dewasa ini, politik pragmatis seakan merupakan bagian dari hegemoni demokrasi modern.

Secara teoritis, istilah ideologi yang telah diadopsi dalam term politik atau kekuasaan politik, khususnya politik Islam dimulai sejak terbitnya Piagam Madinah. Ian Adams, menyatakan bahwa Islam sejak awal sejarahnya telah menjadi agama dunia yang paling politis, karena Nabi Muhammad adalah pendiri negara Islam pertama. Nabi Muhammad adalah pemimpin agama, panglima militer, dan sekaligus menjadi pemimpin

---

[23] Endang Syaifuddin Anshari, *Wawasan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h.. 345.

[24] Politik berbasis keagamaan selalu terkait dengan sistem nilai dan ideologi. Di sinilah banyak timbul konflik ketika wilayah politik dalam arti kekuasaan, mengadopsi sistem nilai dan ideologi tertentu ke dalam negara yang berkarakter *nation state* pluralis seperti Indonesia. Ideologi sebagai sebuah sistem kepercayaan, adalah orientasi tindakan yang berisi kepercayaan yang diorganisir dalam suatu sistem yang koheren. Lihat Muhammad Alfan Alfian Mahyuddin, *Menjadi Pemimpin Politik*: *Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), h.. 245.

politik.[25] Bahkan dipertegas oelh S. Khuda Bakhs bahwa "*Muahmmad not only found a new religion but established a new polity"*.[26]

Menurut Peter L. Berger,[27] konflik ideologi besar yang menjadi bagian dari perang dingin hanya berhenti sementara waktu, dan tidak dapat dijamin berhenti selamanya (*The end of Idelogy*). Sementara itu, muncul suatu format politik baru di akhir abad 20, dimana struktur negara bangsa (*nation-state*) telah ditempatkan pada proses pembahasan konstitusi secara formal antara ideologi nasionalisme religius dan nasionalisme sekuler, menjadi dua mazhab pandangan dunia (*world view*) yang terus bersaing.

Pemikir Islam Kontemporer tentang Politik Islam

Mencermati perkembangan pemikiran politik masa modern, gerakan pembaruan pemikiran Islam mulai terindikasi pada masa Jamaluddin al-Afgani, dan oleh Muhammad Abduh, pembaruan tersebut semakin ditegaskan dengan konsep *rasionalismen*ya. Pendapat Abduh ini dilatarbelakangi oleh mandegnya pemikiran masyarakat muslim waktu itu. Hal ini disebabkan sistem pemerintahan yang absolut dan sewenang-wenang. Menurut Abduh, syari'ah Islam itu mempunyai dua pengertian. Dalam arti sempit yaitu berupa ketetapan-ketetapan Allah dan Rasul yang tidak bisa diubah lagi. Sementara dalam pengertian luas, adalah kaidah-kaidah atau dasar-dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat yang selalu berkembang untuk kemaslahatan umat.[28]

---

[25] Ian Adams, *Idologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depanya* (Yogyakarta: Qalam, 2004), h.. 426-227.

[26] S. Khuda Bakhsh, *Politic In Islam,* (India: Idarah Idabiat, 158), hlm, 1,dalam Zainal Raharawin, *Teologi Politik Islam,* Jurnal Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon, 2014, hlm. 10.

[27] Peter L. Berger, *Kebangkitan Agama Menentang Politik Dunia*, terj. oleh Hasibul Khoir, (Yogyakarta: Arruzz, 2003), h. 30.

[28] Muhammad Azhar, *Filsafat Politik, Perbandingan antara Islam dan Barat,* Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 1996, hlm. 109.

Munawir Sjadzali menyebut terdapat tiga hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran politik modern (kontemporer) pada akhir abad 19 M. *Pertama,* kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-faktor internal, yang berakibat munculnya gerakan pembaruan dan pemurnian. *Kedua,* rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh Dunia Barat atas sebagian besar wilayah Islam, dengan akibat rusaknya hubungan antara Islam dan Barat, dan berkembangnya sikap anti Barat dari umat Islam. *Ketiga,* keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.[29]

Adanya reformasi pemerintahan terutama pada abad ke-19, membawa dampak pada perubahan bagi hukum dan kelembagaan Islam. Perubahan itu terlihat dari yang semula berdasarkan pada legitimasi Islam kini sudah mengalami interaksi dengan pola pikir Barat. yang disikapi dengan berbagai corak respon. Sebagian pemikir politik Islam menghargai dan akomodatif terhadap pemikiran Barat. Namun, ada juga yang menentangnya, ataupun mengedepankan paradigma baru pemikiran politik Islam.[30]

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa misi utama dari ajaran Islam adalah untuk menegakkan amar *makruf dan nahi munkar*. Penegakkan *amar makruf dan nahi munkar*, bukan domain utama lembaga sosial dakwah. Karena untuk menegakkan *amar makruf dan nahi munkar*, mensyaratkan wajibnya kehadiran suatu kedaulatan dan institusi hukum yang dapat melaksanakan dan mengeksekusi

[29] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, ajaran sejarah dan pemikiran,*Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 115.
[30] M. Din Syamsudin*, Antara yang Berkuasa dan yang Dikuasai, Refleksi Atas Pemikiran dan Praktek Politik Islam ",Jurnal Al-Jami'ah,* Vol. 39, No.1 Januari–Juni. 2000.

ekses perbuatan manusia. Lembaga sosial dakwah tidak berwenang menghukum seseorang atas suatu perbuatan, separti menfonis penjara, atau hukum mati dan atau sejenis.

Atas dasar itulah, sangat tidak berdasar jika ada pendapat yang menyatakan bahwa Islam tidak mengurusi politik. Justru politik merupakan jiwa dan ruh dari ajaran Islam. Apabila politik dipisahkan dari ajaran Islam, maka Islam menjadi agama yang tidak sempurna. Dengan demikian kesempurnaan agama Islam, apabila didalamnya termasuk politik. Jadi Islam adalah ajaran yang bersifat dan berwatak *Din Ad-Daulah* (Agama dan Negara).

Berdasarkan pemikiran di atas, tulisan ini adalah kajian politik Islam yang merupakan permasalahan yang selalu aktual dan terus diperdebatkan dikalangan dalam Islam. Permasalahan konsep politik Islam dalam hal konsep bernegara atau *Islamic State* ataupun *Islamic Society* yang berkembang di dunia Islam.

Daftar Pustaka

Abdillah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Maknah*, (penerjemah, Wahib Wahab),Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999.

Abdullah Wahab Khallaf, *Ilm al-Fiqh*, Kairo, Dar al-Qalam, 1978

Adams Ian, *Ideologi Politik Mutakhir Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depannya*, tejh. Ali Noerzaman (Yogyakarta: CV. Qalam, 2004).

Anshari, M.A Endang Syaifuddin., Wawasan Islam, Jakarta, Gema Insani2004

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta Mahkamah Konstitusi*, 2006.

Azra, Azyumardi, *Islam Subtantif: Agar umat tidak jadi buih,* Bandung: Mizan
2000.

Azzam Sali, *Beberapa Pandangan Tentang merintahan Islam*, (penerjemah) Malikul Awwal, Bandung, Mizan, 1990, hlm, 91,93.

Djazuli H.A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm, 25-27.

Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, PT. Grasindo, Jakarta, 1993

Efendy, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam; Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi,* Yogyakarta: Galang Press 2001.
Espesito John L., *Langkah Barat Menghadang Islam,* prjmh. Dina Maediya, (Yogyakarta: Jendela, 2004
John L. Esposito, *Islam Aktual*, (penerjemah, Norma Arbi'a), Jakarta, Inisiasi Press, 2002, hlm 11.
Kartini Kartono, *Pendidikan Politik*, Bandung, Mandar Maju, 1996
Lapidus,Ira M. *Sejarah Sosial Ummat Islam,* Bagian kesatu dan Dua (penerjemah, Ghufron A. Mas'adi), Jakarta, Grafindo Persada, 2000
Mahendra Yusril Izha, *Modernisme dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-i-Islami (Pakistan),* Cet.I, Jakarta Paramadina, 1999
Mahfud MD Moh., *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan,* cet. ke-2 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).
Maududi Abul A'La. *Khilafah dan Kerajaan, Konsep Pemerintahan Islam Serta Studi Kritis Terhadap Bani Umayyah dan Bani Abbas*, (pen), Muhammad al Baqir, Bandung, Mizan, 2007, hlm. 80-84.
Nashir Haedar, *Gerakan Islam Syariat Reproduksi Salfiah Ideologi di Indonesia* (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), hlm. 148.
Nasution Harun, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
Noer Deliar, *Ideologi Politik dan Pembangunan* (Jakarta: LPPM Tan Malaka, 2007
Qardhawi Yusuf, *Karakteristik Islam; Kajian Analitik (Penerj Rofi' Munawwar dan Tajudin),* Surabaya, Risalah Gusti, 1996
Qardhawi Yusuf, *Legalitas Politik Dinamika Perspektif Nash dan Asy-Syariah*, (terj).. Amirullah Kandu (Bandung: Pustaka Setia, 2008)
Qardhawi Yusuf, *Fiqih Negara,* (penerjemah, Syafril Halim), Rabbani Press, Jakarta, 1997
Ritzer George, *Sociological Theory* (New York: McGraw-Hill Inc., 1992
Syaikh Abdul Malik Al-Jaziri, *Haramkah Partai, Pemilu, Parlemen, Fatwa Syaikh Nashiruddin Al-Albani,* Media Hidayat, Yogyakarta, 1419
Sukarna, *Sistem Politik*, Alumni, Bandung, 1981
Thompson John B., *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia* (Yogyakarta: IRCisCO, 2003).
Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta, Rajawali Prees, 1997.
W. Montgomeri Watt, *Muhammad Prophet nad Statesman, London Oxford University* Press, 1961.

PLAGIARISMA

100% Unique

Total 21464 chars (2000 limit exceeded) , 272 words, 12 unique sentence(s).

Results	Query	Domains (original links)
Unique	Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis	-
Unique	kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif	-
Unique	Batasan dan Rumusan Mas	-
Unique	Abstrak Keberadaan Islam dalam berbagai bidang tentu bukan hal yang diragukan, segala aspek dari	-
Unique	sendiri sudah menorehkan catatan panjang perjalanan kekuasaan dalam konteks pemahaman politik umat Islam, kontroversi pendirian	-
Unique	Tulisan ini mencoba memberikan gambaran singkat tentang politik dan Islam dalam tinjauan sejarah	-
Unique	di wilayah sosial-kultural ataupun relasi antara agama dan negara, dan juga Islam juga tidak pernah	-
Unique	seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengedepankan hubungan antara manusia dengan Allah	-
Unique	Salah satunya Sosiolog Emile Durkheim yang secara sinis ia mengatakan ”ide tentang agama adalah	-
Unique	Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi	-
Unique	kaum muslim dibelahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW,	-
Unique	wilayah politik, integritas keulamaan serta muru’ah-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga dirinya sebagai	-

Abstrak Keberadaan Islam dalam berbagai bidang tentu bukan hal yang diragukan, segala aspek dari sisi kehidupan mendapat porsi yang sama dalam ajaran Islam, termasuk persoalan politik. Hal yang berhubungan dengan kekuasaan ini sangat menarik perhatian para peneliti karena sejarah Islam sendiri sudah menorehkan catatan panjang perjalanan kekuasaan dalam konteks pemahaman politik umat Islam, kontroversi pendirian partai, politisi muslim dalam menerjemahkan kekuasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran singkat tentang politik dan Islam dalam tinjauan sejarah dan kontemporer.A. Latar Belakang Ketika mendefinisikan Islam terpisah dari politik terdapat berbagai ketimpangan yang melingkupinya, baik di wilayah sosial-kultural ataupun relasi antara agama dan negara, dan juga Islam juga tidak pernah mendefinisikan politik secara lengkap. Meski demikian, umat Islam pada umumnya mempercayai Islam sebagai sebuah agama yang universal, Islam seringkali dipandang sebagai sekedar kepercayaan dan keyakinan yang lebih mengedepankan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Salah satunya Sosiolog Emile Durkheim yang secara sinis ia mengatakan "ide tentang agama adalah roh masyarakat". Sangat beragam pendapat para pengkaji politik Islam tentang pandangan agama Islam terhadap konsepsi dasar dari teori politk-nya. Mengingat sejarah politik Islam juga banyak menyisakan pertanyaan etis. Sejak Nabi muhammad SAW melakukan dakwah untuk yang pertama kalinya, sudah menjadi inspirasi bagi kaum muslim dibelahan dunia ini dalam melihat pola dan sistem yang diajarkan oleh Nabi SAW, dalam menggagas politik yang berkarakter Islamis. kehidupan duniawi yang kadang-kadang melibatkan trik-trik yang manipulatif. Lebih lanjut, Azyumardi Azra mengingatkan kepada para ulama untuk sebaiknya tidak terlibat dalam wilayah politik, integritas keulamaan serta muru'ah-nya harus dijaga jika tidak ingin kehilangan harga dirinya sebagai ulama. B. Batasan dan Rumusan Mas